

Analisis Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan terhadap Media Pelaporan Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Reza Meynaldi¹, Resmi Ranti Rosalina²

^{1,2}Politeknik Piksi Ganesha

¹rezameynaldi20@gmail.com, ²resmi.ranti@gmail.com

ABSTRACT.

This research was conducted to find out the Role of Regional Government Information Systems (SIPD) Administration to Media for Financial Reporting in the Regional Development Planning Board of West Java Province. The method applied in this research is descriptive qualitative with data analysis that has been collected on the independent variable, namely the Regional Government Information System (SIPD) and administration as well as dependent variables, namely financial reporting media. The results of the study show that SIPD has an important role in accessing local government development information. So that efforts that can be made to overcome this are coordination made to the West Java BPKAD as the manager of Regional Financial Information regarding SIPD.

Keywords: The Role, Local Government Information Systems (SIPD) Administration, Financial Reporting Media

ABSTRAK.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan terhadap Media Pelaporan Keuangan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode yang diaplikasikan pada riset ini ialah deskriptif kualitatif dengan analisis data yang telah dikumpulkan pada variabel bebas yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) penatausahaan serta variabel tidak bebas yaitu media pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD mempunyai peranan penting pada akses informasi pembangunan daerah pemerintah. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu koordinasi yang dilakukan kepada BPKAD Jawa Barat selaku pengelola Informasi Keuangan Daerah mengenai SIPD.

Kata kunci: Peran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan, Media Pelaporan Keuangan

PENDAHULUAN

Globalisasi saat ini memberikan perkembangan terhadap teknologi dan informasi yang memberikan dampak terhadap perubahan masyarakat yang berubah menjadi masyarakat modern dengan mempunyai ciri yaitu semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi yang berguna untuk kepentingan. Perubahan tersebut dirasakan oleh seluruh organisasi, instansi, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, hal tersebut dibutuhkan guna meningkatkan kreatifitas dalam meningkatkan suatu pekerjaan, menjadi cara untuk menyelesaikan masalah sampai dengan pengambilan keputusan.

Sebagai sarana penunjang mengenai pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan tempat menyajikan informasi untuk menunjang aktivitas manusia dalam menentukan suatu informasi, maka keberadaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk pengembangan suatu perusahaan dikarenakan sebagai penyedia informasi secara cepat, lengkap, tepat, dan akurat. Teknologi informasi juga memberikan dampak positif terhadap operasional kerja dan mendapatkan informasi lebih efisien untuk perusahaan.

Teknologi informasi diperlukan guna pengelolaan keuangan daerah yang dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan serta pengembangan mengenai proses informasi agar dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa tata Kelola perusahaan harus efektif, efisien, transparan serta berkualitas dengan menggunakan sistem manajemen bisnis elektronik yang terlegalitas. Pengelolaan keuangan daerah diperlukan strategi yang digunakan dalam prosedur pencatatan dokumen mengenai perancangan dan anggaran di tingkat SKPD dalam aplikasi pembangunan daerah sehingga lebih teratur dengan berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyampaian informasi kepada masyarakat diperlukan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat SIPD). SIPD merupakan suatu sistem pengelolaan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk dokumentasi, administrasi, dan pengolahan data pembangunan daerah menjadi informasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Selain itu juga SIPD digunakan untuk penunjang dalam pengambilan keputusan demi mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan tujuan informasi mengenai pembangunan daerah dapat tercapai. Penggunaan SIPD didukung dengan adanya Pergub Nomor 57 Tahun 2019 mengenai pengelolaan *system* informasi perancangan dan penganggaran terpadu dapat mewujudkan ketetapan mengenai proses perancangan dan anggaran tentang pembangunan wilayah Provinsi, tata laksana yang efisien akan tercapai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang bertujuan untuk menciptakan perancangan dan anggaran yang bermutu, terwujudnya keterbukaan, efisiensi, keberhasilan, dan tanggung jawab perancangan dan anggaran pembangunan untuk membantu peningkatan kemampuan pelayanan publik.

Manfaat SIPD selain untuk informasi mengenai pembangunan daerah dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pengaluran data, dokumen elektronik. Berkas-berkas tersebut disajikan dengan ilustrasi berkas documenter berbentuk contoh kebutuhan informasi yang memiliki karakter dinamis pada tahapan pengelolaan keuangan setempat yang termasuk kepada perancangan, anggaran, implementasi, penatausahaan, pemberitahuan, pertanggungjawaban, dan control keuangan daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIPD sejauh ini sudah diimplementasikan di seluruh organisasi yang berada di setiap daerah Provinsi khususnya Badan Pembangunan Daerah Jawa Barat yang telah mengimplementasikan SIPD sebagai sistem penunjang pelaporan keuangan. Namun disisi lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat mempunyai hambatan yang berhubungan dengan sistem dan pelaporan keuangan.

Menurut sumber data yang didapat dari wawancara dengan pengelola keuangan dan selama proses observasi berlangsung yang dilaksanakan di Subbagian Keuangan dan Aset di Bidang Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa ketika diterapkannya SIPD hambatan yang terjadi adalah apabila disaat terdapat kesalahan input laporan, tidak bisa diperbaiki secara mandiri (*shortcut*) oleh pengelola/operator. Terlalu banyak koordinasi dengan BPKAD Jabar yang prosesnya bisa menghabiskan waktu 2-3 hari. Server yang kurang mendukung atau mengalami gangguan apabila banyak pengguna yang mengakses pada waktu tertentu seperti diwaktu awal bulan dan akhir tahun.

Hambatan yang terjadi pada peranan SIPD ini juga disebabkan belum tersedianya fitur akuntansi pelaporan dan terlalu banyak menu yang seharusnya bisa dibuat lebih simpel atau sederhana. Tetapi bukan hanya hal itu yang menjadi hambatan, Badan Pemeriksa Keuangan atau untuk selanjutnya disingkat BPK selaku alat perlengkapan negara atau organ negara yang mempunyai tugas sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan negara, tidak memberikan sosialisasi apabila ada peraturan baru terkait pengelolaan keuangan ataupun penganggaran.

Hambatan yang telah dikemukakan diatas menjadikan pegawai/pengelola keuangan memiliki anggapan bahwa pelaporan keuangan melalui SIPD masih kurang optimal, dikarenakan sistem yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti: mekanisme pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) penatausahaan, peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) penatausahaan terhadap pelaporan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, hambatan terhadap pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Permerintahan Daerah (SIPD) penatausahaan, dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan Sistem Informasi Permerintahan Daerah (SIPD) penatausahaan.

TIJAUAN LITERATUR

Sistem

Menurut (Lestari, 2020) sistem terdiri dari dua atau lebih perangkat yang memiliki keterkaitan dan saling berhubungan guna membangun kesatuan kumpulan sehingga mewujudkan suatu tujuan. Menurut (Mulyani, 2018) sistem adalah gabungan dari subsistem, perangkat, ataupun bagian yang berkolaborasi serta mempunyai tujuan yang sama yaitu menghasilkan *output* yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut (Jauhari, 2020) bahwa sistem adalah keterkaitan antara satu unit dengan unit lainnya dengan menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa *system* adalah pengelompokkan dari subsistem, perangkat

atau komponen yang terdapat keterkaitan membentuk system sebagai pendukung melakukan pekerjaan dengan hasil peroduk guna mencapai tujuan.

Informasi

Menurut (Tukino T. , 2018) sistem dapat di kemukakan sebagai sebuah rangkaian jaringan kerja dari berbagai macam elemen - elemen yang saling berhubungan guna untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem Informasi

Sistem informasi yaitu salah satu perangkat yang terdiri dari macam-macam bagian diantaranya yaitu manusia, teknologi informasi, dan metode yang bekerja dengan cara mengoperasikan, mengarsipkan, menelaah, dan menyebarkan informasi agar tujuan dapat tercapai [11, p. 5]. Perangkat yang terdapat dalam sistem informasi mempunyai keterkaitan dalam menjalankan proses untuk mencapai tujuan, perangkat tersebut yaitu terdiri dari masukan (*Input Block*), model (*Output Block*), keluaran (*Output Block*), teknologi (*Technology Block*), basis data (*Database Block*), dan kendali (*Controls Block*).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Menurut (Wahyudi & Ridho, 2019) sistem informasi pemerintah merupakan sejumlah komponen yang dimana komponen itu saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah.

Manfaat Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Manfaat adanya sitem Infrmasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terbagi menjadi 4 (empat) elemen yaitu :

- a. Bagi Pemerintah Pusat
 1. Terdapat informasi pemerintahan;
 2. Petunjuk peninjauan pemerintahan peraturan nasional;
 3. Pengefektifan serta pengefisiensi pelaksanaan binwas.
- b. Bagi Pemerintah Daerah
 1. Keberhasilan dan efektif pengelolaan pemerintahan penyelenggara pemerintah daerah menggunakan sistem informasi yang saling berkaitan;
 2. Menyederhanakan penyajian informasi.
- c. Bagi Masyarakat

Mendapatkan informasi dengan menggunakan akses website mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Bagi Pelaku Usaha

Menyederhanakan dalam melihat situasi dan kondisi mengenai daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah untuk pertimbangan melakukan investasi.

Ruang Lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Tercantum pada Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 mengenai teknis penginformasian Pemerintah Daerah yang menjelaskan ruang lingkup SIPD terkait informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintah daerah lainnya.

Informasi Keuangan Daerah

Informasi mengenai perancangan anggaran daerah serta tata usaha *financial* daerah, informasi akuntansi serta laporan keuangan daerah, dengan akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah, perangkat daerah, finansial daerah lainnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Tingkat keberhasilan implementasi SIPD dapat dilihat dari seberapa banyak faktor yang mempunyai hubungan satu sama lainnya. pengimplementasi pada peraturan yang disebabkan oleh 4 subjek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Laporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan *financial* pemerintah menjelaskan mengenai situasi dan kondisi tentang transparansi keuangan dari suatu instansi atau perusahaan sebagai acuan kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu juga bahwa laporan keuangan ialah pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah atas sumber daya yang dikelola dan dapat memperlihatkan posisi keuangan hasil kerja pemerintah dalam suatu periode serta dalam periode selanjutnya .

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan dibutuhkan dengan tujuan pemberitahuan anggaran dari kegiatan ekonomi yang digunakan dalam kegiatan di pemerintahan, memperhitungkan keterbukaan pengelolaan keuangan, penilaian keberhasilan dan ketepatan laporan serta mendukung untuk menetapkan kepatuhannya terhadap aturan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan. Pelaporan keuangan terdapat tanggungjawab melakukan laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan beserta tujuan yang dicapai guna terwujudnya kepentingan mengenai akuntabilitas, manajemen, transparansi, kesetaraan yang imbang antar generasi, dan evaluasi kerja.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memproduksi informasi terkait preposisi *financial*, perealisasi anggaran arus kas, hasil kegiatan serta pergantian entitas yang bermanfaat bagi para pengguna duntuk mengevaluasi pemerintah ketika

menyediakan informasi yang bermanfaat pada pengambilan keputusan. Langkah penyajian informasi tentang tempat sumber daya ekonomi, keharusan serta kepemilikan mengenai keuangan di pemerintah, menyajikan informasi tentang pergantian tempat sumber daya ekonomi, serta kepemilikan mengenai keuangan di pemerintah, menyajikan mengenai informasi sumber daya, peruntukkan, serta penggunaan informasi tentang kecukupan dalam penerimaan masa bertahap guna pengeluaran anggaran serta menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dengan hasil yang telah tercapai, menyajikan informasi tentang dana yang dibutuhkan dalam kegiatan, menyajikan informasi tentang kondisi keuangan serta keadaan wujud yang mempunyai hubungan dengan sumber penerimaan efisien dalam kurun waktu yang pendek maupun kurun waktu Panjang serta dari pemungutan pajak dan pinjaman, selain itu menyajikan informasi tentang peralihan keadaan bentuk keuangan untuk dilakukan pelaporan atas terjadinya perubahan yang diakibatkan dari aktivitas yang dilakukan selama jangka waktu pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan kadar *normative* yang diperlukan untuk menjadikan informasi akuntansi dapat tersaji dengan baik demi tercapai sebuah tujuan. Laporan keuangan pemerintah dapat diterima sesuai pemenuhan kualitas yang telah ditentukan dengan berupa relevan, andal, dapat disetarakan, dan dimaknai dengan baik.

Prinsip Pelaporan Keuangan Pemerintah

Prinsip yang dijunjung dalam kegiatan pelaporan finansial pemerintah berbasis akuntansi, dengan mengaplikasikan prinsip nilai historis, realisasi, substansi bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

Komponen-komponen Laporan Keuangan

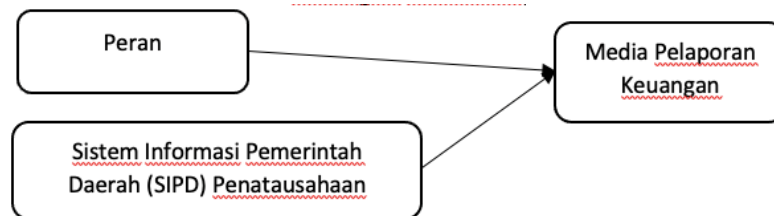
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan harus memenuhi komponen tentang laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Pengguna Laporan Keuangan

Laporan finansial dapat dimanfaatkan bukan oleh pemerintah saja melainkan dapat digunakan oleh masyarakat, wakil rakyat, lembaga pemeriksa serta lembaga pengawas, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi serta pinjaman, dan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan aturan yang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka Penelitian

Model dasar penelitian sebagai gambaran dasarnya yaitu:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Primer, 2023

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2015:3) “metode penelitian secara umum adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Di dalam penelitian ini tentunya memerlukan suatu penemuan, pembuktian dan pengembangan riset penelitian dari penelitian yang sudah ada, maka dari itu penulis mengambil metode penelitian kuantitatif.

Operasional Variabel

Dalam pengujian hipotesis maka dilakukan prosedur sesuai dengan operasional variabel untuk menentukan jenis indikator beserta skala variabel terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan riset menggunakan metode kualitatif yang dilakukan menggunakan cara pengamatan atas fenomena dan lebih mendalami makna dari fenomena tersebut dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi. Pendekatan yang dipakai dalam metode penelitian berupa pendekatan penelitian deskriptif dengan melakukan analisis terhadap data yang kemudian dilakukan penjelasan atau penggambaran atas data yang telah dikumpulkan.

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan menggunakan variabel bebas yaitu peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan penatausahaan sedangkan variabel tidak bebas yaitu media pelaporan keuangan.

Sumber data riset ini diaplikasikan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi guna mendapatkan proses kerja yang dilakukan oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta teknik wawancara untuk mendapatkan sebuah solusi dari adanya permasalahan yang terjadi. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan permasalahan maka objek dari penelitian ini yaitu pegawai di daerah yang memakai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Penelitian Kepustakaan

Dilakukan untuk mencari, memperoleh dan mengumpulkan data *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini.

Browsing Internet

Browsing internet dilakukan dikarenakan data yang didapat oleh penulis dari *literature*, buku-buku yang terkait masih belum mencukupi untuk menyelesaikan penulisan penelitian.

Fokus Penelitian

Adapun Fokus pelaksanaan penelitian ini yakni:

1. Mekanisme Pelaporan Keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan.
2. Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan terhadap Pelaporan Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat .
3. Hambatan Terhadap Pelaporan Keuangan melalui Sistem Informasi Permerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan.
4. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Sistem Informasi Permerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaporan Keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut :

1. Aplikasi SIPD dapat diakses di laman URL sipd.kemendagri.co.id



Gambar 2 Aplikasi SIPD

Sumber: sipd.kemendagri.co.id, 2023

2. Pilih menu SIPD yang terdapat di tengah halaman, lalu dapat memilih provinsi dengan cara mengkliknya sesuai dengan wilayah yang akan dilakukan proses penatausahaannya.
3. Memilih nama provinsi/kabupaten/kota dengan mengkliknya lalu akan muncul mengenai username dan password.

4. *Username and password* yang digunakan untuk membuka SIPD sesuai dengan akun TAPD Keuangan (selaku BUD) atau Kepala SKPD (selaku PA) sesuai dengan provinsi/kota/kabupaten.
5. Ketika sudah masuk dengan akun tersebut maka dapat memilih tahun sesuai dengan data yang akan diinput dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memilih bagian “Penatausahaan Pengeluaran” lalu memilih “Pembuatan TBP dan STS”.
 - b. Memilih “Pelimpahan TBP dan STS” lalu memilih sub bagian “Kunci Rekening”, kemudian dapat mengklik tombol “Buat TBP dan STS”.
 - c. *Form Data TBP* kemudian melengkapi Nilai Pembelanjaan di setiap Rekening.
 - d. Upload file mengenai bukti penyetoran sesuai dengan jumlah transaksi penyetoran.
 - e. Lalu isi nilai transaksi sesuai dengan jumlah dan sesuai dengan Nilai Pengajuan.
 - f. Melengkapi data pembayaran lalu pilih dan klik transfer.
 - g. TBO yang sudah dibuat akan masuk ke “TBP yang sudah dikeluarkan”, sub bagian “Kunci Rekening”.

Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan terhadap Pelaporan Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa keberadaan SIPD Penatausahaan dalam proses pelaporan keuangan di pemerintah daerah khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai peran penting yang didukung oleh mekanisme yang sudah aman dan berjalan lancar, sumber daya manusia yang sudah terlatih dan kompeten, serta sosialisasi yang diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Adanya web SIPD dapat membantu dan memudahkan pengguna dalam akses data pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi mengenai transparansi keuangan, daerah, serta informasi lainnya mengenai pemerintahan daerah yang mempunyai keterkaitan untuk digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan demikian dapat menciptakan konsisten mengenai tahapan perencanaan dan penganggaran secara efisien sehingga memberikan suatu kinerja dalam organisasi yang tepat bagi pengguna terutama dalam pengambilan keputusan.

Peranan SIPD dalam pelaksanaan anggaran penatausahaan membantu terlaksananya pengelolaan penatausahaan dengan efisien serta murni dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu SIPD dapat mempermudah penyampaian informasi pengelola keuangan lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan karena waktunya yang efisien pengguna tidak perlu datang langsung ke kantor tetapi dapat membuka sistem melalui domain kapan dan dimana saja.

SIPD juga mendukung program *paperless* yaitu dengan mengurangi penggunaan kertas pada saat *input* pelaporan keuangan melalui SIPD tidak

membutuhkan *hardcopy* berkas melainkan berbentuk *soft file*. Keuntungan SIPD lainnya adalah tingkat keamanannya jauh lebih tinggi karena pelaporan yang dilakukan melalui sistem layanan SIPD ini memiliki perlindungan yang sudah memiliki kepastian hukum.

Dengan melihat peranan SIPD yang didapatkan pengguna jika melakukan pelaporan keuangan menggunakan layanan SIPD maka sudah pasti SIPD sangat dibutuhkan bagi pengelola keuangan. Dalam penelitian ini peranan SIPD Penatausahaan menjadi pembahasan karena peneliti ingin mengetahui apakah dengan penerapan SIPD memiliki perkembangan bagi pelaporan keuangan yang berasal dari penatausahaan pengeluaran.

Hambatan Terhadap Pelaporan Keuangan melalui Sistem Informasi Permerintahan Daerah (SIPD)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peranan SIPD yang begitu penting karena dapat mempermudah mengenai perolehan informasi tetapi masih terdapat hambatan terhadap pelaporan keuangan melalui SIPD khususnya di Subbagian Keuangan dan Aset di Bidang Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa ketika diterapkannya SIPD hambatan yang terjadi adalah apabila disaat terdapat kesalahan input laporan/pelimpahan kegiatan, tidak bisa diperbaiki secara mandiri (*shortcut*) oleh pengguna sistem/pengelola keuangan. Terlalu banyak koordinasi dengan BPKAD Jabar yang prosesnya bisa menghabiskan waktu 2-3 hari. Server yang kurang mendukung atau mengalami gangguan pada waktu tertentu apabila banyak pengguna yang mengakses.

Hambatan yang terjadi pada peranan SIPD ini juga disebabkan belum tersedianya fitur akuntansi pelaporan dan terlalu banyak menu/fitur yang seharusnya bisa dibuat lebih simpel atau sederhana. Tetapi bukan hanya hal itu yang menjadi hambatan, Badan Pemeriksa Keuangan atau untuk selanjutnya disingkat BPK selaku alat perlengkapan negara atau organ negara yang mempunyai tugas sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan negara, tidak memberikan sosialisasi apabila ada peraturan baru terkait pengelolaan keuangan ataupun penganggaran.

Hambatan yang telah dikemukakan diatas menjadikan pengguna sistem/pengelola keuangan memiliki anggapan bahwa Pelaporan Keuangan melalui SIPD masih kurang optimal, dikarenakan sistem yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Sistem Informasi Permerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi upaya atau solusi untuk memecahkan atau menangani hambatan dalam penggunaan system SIPD Penatausahaan yaitu Bendahara Pengeluaran (BP) Subbagian Keuangan dan Aset sudah melakukan koordinasi dengan BPKAD Jabar apabila saat terjadi kesalahan input laporan/pelimpahan kegiatan, bisa diperbaiki/dieksekusi secara mandiri oleh pengguna sistem/pengelola keuangan. Ketika server mengalami gangguan pada saat

input pelaporan keuangan melalui layanan sistem, Bappeda Jabar belum memiliki cara/alternatif selain menunggu pemulihan server dikarenakan sistem yang saat ini masih dalam tahap pengembangan oleh penyelenggara dan pengelola yaitu Kemendagri.

Sejauh ini belum ada upaya/tindaklanjut koordinasi kepada Kemendagri secara resmi melalui surat ataupun official email dari hambatan belum tersedianya fitur akuntansi pelaporan dan terlalu banyak menu/fitur yang seharusnya bisa dibuat lebih simpel atau sederhana.

Apabila ada peraturan baru terkait pengelolaan keuangan ataupun penganggaran BPK selaku lembaga negara yang bertugas sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan negara, tidak memberikan sosialisasi secara berkelanjutan. Sejauh ini upaya yang dapat dilakukan adalah koordinasi kepada BPKAD Jabar selaku pengelola Informasi Keuangan Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mekanisme pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan dengan mengakses link sipd.kemendagri.co.id lalu klik sesuai wilayah dan memasukkan username dan password sesuai dengan akun TAPD Keuangan (selaku BUD) atau Kepala SKPD (selaku PA) masing-masing provinsi/kota/kabupaten lalu pilih tahun sesuai data yang diinput. Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan terhadap Pelaporan Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan transparansi keuangan daerah. Penggunaan SIPD ini memiliki hambatan yang terjadi ketika salah input tidak dapat diperbaiki secara mandiri, server kurang mendukung, fitur yang terlalu beragam, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPK sebagai Lembaga keuangan negara. Terlepas dari adanya hambatan maka adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adanya koordinasi yang dilakukan kepada BPKAD Jawa Barat selaku pengelola Informasi Keuangan Daerah mengenai SIPD.

Saran

Seharusnya pemerintah melakukan kegiatan lain selain diadakannya pemyarakatan mengenai pengoperasian aplikasi SIPD saja tetapi seharusnya diadakan pembelajaran secara eksklusif untuk pengoperasian aplikasi SIPD sehingga sumber daya manusia lebih kompoten serta membangun semangat kerja. Selain itu juga adanya peningkatan terhadap bimbingan teknis bagi seluruh pengguna aplikasi SIPD sehingga dapat menangani ketika SIPD mengalami *error* atau *server down*. Selain itu juga ketika terdapat pelimpahan sub kegiatan dapat memperbaiki atau mengeksekusi secara mandiri dikarenakan tugas pengelola lebih mengerti sehingga tidak banyak membuang waktu untuk melakukan koordinasi dengan BPKAD Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dias, N. E. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, vol. 21, no. 1, pp. 62-79.
- H, C. K. (2019). *Pengantar Teknologi Informas*. Banjarmasin: Deepublish.
- Jauhari, A. (2020). *Pengantar Sistem Informasi (Model, Siklus, Desain, Sistem Pendukung Keputusan)*. Kebumen: Media Nusa Creative.
- Kesuma, R. P. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. *J. Ilm. Mhs*, vol. 1, no. 2, pp. 11-23.
- Lestari, C. K. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Aaplikasi SIA Sederhana dalam UMKM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maksanah, U. (2020). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Bandung: LOGOZ PUBLISHING.
- Masnila, N. (2021). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Solok: CV. Mitra Cendikia Media.
- Mulyani, S. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi di Sektor Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Mulyanti, K. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Iron Bird Logistics. *L. J*, vol. 1, no. 2, pp. 187-194.
- Novitasari, M. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- R, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, D. P. (2020). *Konsep Sistem Informasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ramdani, F. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pengajuan Anggaran Biaya Berbasis Web Di Kantor XXX. *Jurnal EKBIS*, vol. 9, no. 2, pp. 47-55.
- Risna, A. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Kurikulum*. Pekalongan: NEM.
- Siagian, F. H. (2020). *Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Retrieved from Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah: https://satudata.dinkes.riau.go.id/sites/default/files/KEBIJAKAN_SIPD.pdf
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwani, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem Surat Masuk Dan Surat Keluar (SISUMAKER) Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. *J. ILMU Sos. DAN ILMU Polit. RAJA HAJI*, vol. 3, no. 2787-801IEEiIEE.
- Tukino. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi E-Marketing Pada Pt Pulau Cahaya Terang. *Computer Based Information System Journal*, 25-33.
- Tukino, T. (2018). Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Gangguan Dan Restitusi Pelanggan Internet Corporate Berbasis Web (Studi Kasus Di PT. Indosat Mega Media West Regional). *Jurnal Ilmiah Informatika*, 1-10.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 3 (2024) 1524-1536 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.3826

Velk, W. V. (2021). Managing Information Asymmetry In Public-Private Relationship Undergoing A Digital Transformation : The Role Of Contractual And Relational Governance. *IJOPM*, vol. 41, no. 7, pp. 1145–1191.

Wahyudi, M. D., & Ridho, M. R. (2019). Sistem informasi penjualan mobil bekas berbasis web pada cv phutu oil club di kota batam. *Jurnal Comasie*, 1-10.